

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan akuntabilitas yang disusun secara priodik yang memuat informasi yang diperlukan, serta dapat dipergunakan sebagai media oleh Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai bahan laporan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Disisi lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bahan informasi tentang akuntabilitas yang telah dilaksanakan dan menjadi acuan kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Tersusunnya LAKIP ini adalah merupakan implementasi dari Instruksi Perpres 2014 Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbulitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang didalamnya memuat penilaian kinerja yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.

Kami berharap Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntanbilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya ini, semoga bermanfaat Amin.

Sungai Raya, Februari 2020

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

EDDY MUDIANTO, SH. MH
NIP. 19660823 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN.....

A. GAMBARAN UMUM SKPD.....

 1. Pendahuluan.....

 2. Susunan Organisasi.....

 3. Tupoksi.....

 4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....

 5. Sumber Daya Keuangan.....

 6. Sarana dan Prasarana.....

B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued)

BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....

A. RENSTRA SKPD.....

 1. Visi.....

 2. Misi.....

 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama..

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....

BAB. IV PENUTUP.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Formulir Realisasi Anggaran

Formulir Sasaran Kinerja

Formulir Capaian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

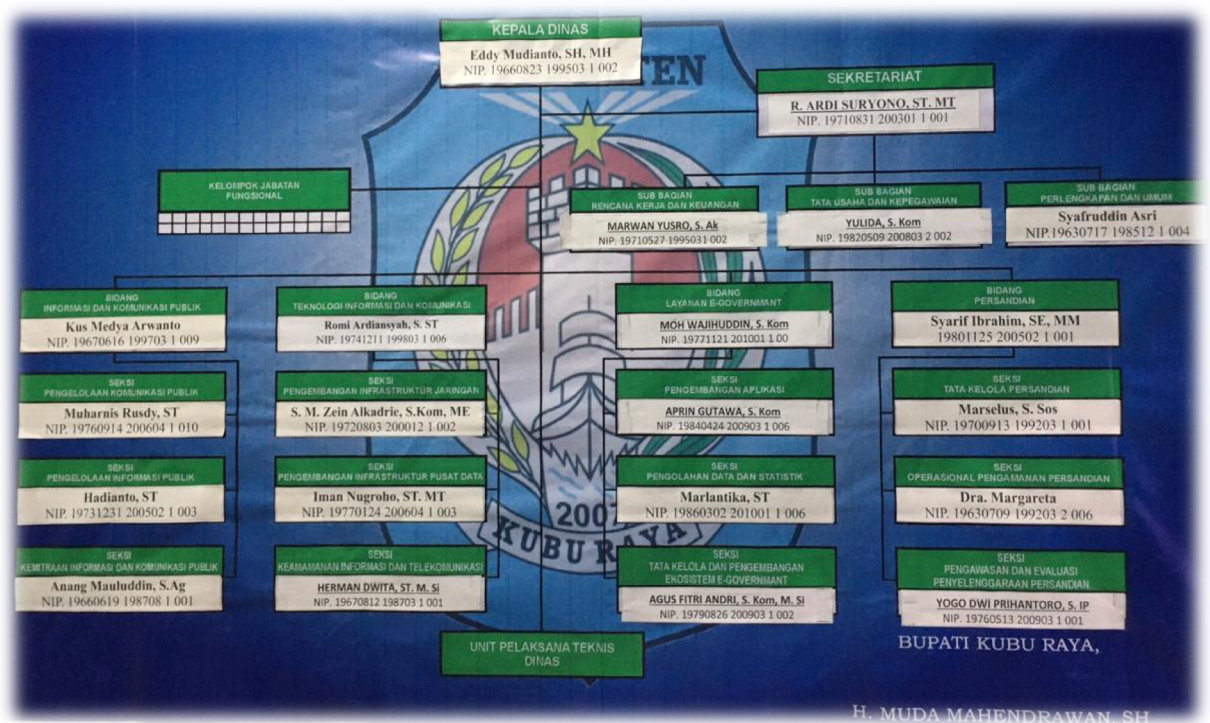
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Nopember 2009 Sebagai mana telah di ubah dengan Perda No. 3 tahun 2014 perubahan atas perda No. 99 tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Kubu Raya. Merupakan salah satu dinas teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang Membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data
 - Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

5. Bidang E- Government yang membawahi 4 (empat) seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Aplikasi
 - Seksi Pengolahan Data dan Statistik
6. Bidang Persandian yang membawahi 1(satu) seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Tata Kelola Persandian
 - Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, berikut rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang komunikasi dan informatika.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dibidang Komunikasi dan Informasi;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informasi;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Data;
- 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi dan;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

c. **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris

- a) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan umum;
- b) Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - ✓ Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dinas
 - ✓ Pengorganisasian, pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan dinas sesuai lingkup tugasnya
 - ✓ Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum

- ✓ Pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sekretariat membawahi:

- ✓ Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas rencana kerja dan keuangan.
 - Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan;
 - pengorganisasian pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan,dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian, dan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

- Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perlengkapan umum.
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlengkapan dan umum;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas perlengkapan dan umum;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlengkapan dan umum dan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- a) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan komunikasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- b) Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - ✓ Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang dan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - ✓ Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai lingkup tugasnya.
 - ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan Komunikasi Publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.
 - ✓ Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - ✓ Pengendalian kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - ✓ Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Membawahi:
 - ✓ Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengelolaan komunikasi publik.
 - Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengelolaaan Komunikasi Publik;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan Komunikasi Publik;
- Pengorganisasian, pengumpulan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan komunikasi publik, dan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

✓ Seksi Pengelolaan Informasi Publik

- Seksi Pengelolaaan Informasi Publik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan tugas pengelolaan informasi publik.
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengelolaan informasi publik mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengelolaaan Informasi Publik;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan informasi publik;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi publik;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan informasi publik;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

✓ Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

- Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik;
 - Penyiapan bahan dukungan penyelenggaraan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik dan;
 - Penyiapan bahan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - Penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang statistik;
 - Pelayanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
- b) Untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembangunan infrastruktur jaringan, pengembangan infrastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi.
- c) Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - ✓ Perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - ✓ Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja penyilaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai lingkup tugasnya;
 - ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan infrastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi
 - ✓ Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - ✓ Pengendalian kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - ✓ Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :
 - ✓ Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengembangan infrastruktur jaringan.

- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan mempunyai fungsi:
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur jaringan
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengembangan infrastruktur jaringan
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan infrastruktur jaringan
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur jaringan, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data

- Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengembangan infrastruktur pusat data.
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur pusat data
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengembangan infrastruktur pusat data
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan infrastruktur pusat data

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- ✓ Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
 - Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas keamanan informasi dan telekomunikasi.
 - Untuk melaksanakan tugas di atas, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keamanan informasi dan telekomunikasi
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas keamanan informasi dan telekomunikasi
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang keamanan informasi dan telekomunikasi, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Layanan E-Government

- a) Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistic, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem *e-government*.
- b) Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang E-Governmet mempunyai fungsi:
 - ✓ Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Layanan *E-Government*;

- ✓ Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan *E-Government* sesuai lingkup tugasnya
- ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem *e-government*
- ✓ Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya
- ✓ Pengendalian kegiatan di Bidang Layanan *e-government*
- ✓ Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan *e-government*, dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Layanan E-Government Membawahi:

- ✓ Seksi Pengembangan Aplikasi
 - Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengembangan aplikasi.
 - Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan aplikasi
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengembangan aplikasi
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan aplikasi
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan aplikasi, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ Seksi Pengolahan Data dan Statistik

- Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengolahan data dan statistik
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengolahan Data dan Statistik
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengolahan data dan statistic
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengolahan data dan statistic
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengolahan daerah bidang pengolahan data dan statistik, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Persandian

- a) Bidang Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- b) Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Persandian mempunyai fungsi:
 - ✓ Perencanaan dan penyusunan operasional program operasional kerja di Bidang Persandian;
 - ✓ Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Persandian sesuai lingkup tugasnya
 - ✓ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian,

serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian

- ✓ Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya
- ✓ Pengendalian kegiatan di Bidang Persandian
- ✓ Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Persandian, dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Bidang Persandian Membawahi:

- ✓ Seksi Tatakelola Persandian;
 - Seksi Tatakelola Persandian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata kelola persandian.
 - Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Persandian mempunyai fungsi:
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Tata kelola Persandian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Tata Kelola Persandian
 - Pengorganisasian, pengempulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata kelola persandian
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidnag tata kelola persandian
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata kelola persandian, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian
 - Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas operasional pengamanan persandian

- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang operasional pengamanan persandian
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas operasional pengamanan persandian
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang operasional pengamanan persandian
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang operasional pengamanan persandian, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓ Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

- Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- Untuk melaksanakan tugas di atas, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai fungsi :
 - Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 - Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan

penyelenggaraan tugas pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
- Penyiapan bahan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

A. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sumber daya Dinas Kominfo dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi:

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Ketersediaan sumberdaya manusia merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya.

Dan oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

a. Rekapitulasi Pegawai Pergolongan

Dari jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya saat ini sebanyak 30 orang, terdiri dari: 24 laki-laki dan 6 perempuan. Sementara jumlah pegawai (PNS) menurut pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan IV/C : 0 Orang
- 2) Golongan IV/B : 2 Orang
- 3) Golongan IV/a : 3 Orang
- 4) Golongan III/d : 11 Orang
- 5) Golongan III/c : 5 Orang
- 6) Golongan III/b : 1 Orang

7) Golongan III/a : 8 Orang

b. Rekapitulasi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

- 1) S3 : 0 Orang
- 2) S2 : 7 Orang
- 3) S1 : 16 Orang
- 4) D3 : 5 Orang
- 5) SLTA : 2 Orang

Sementara jumlah pengawai Non PNS berjumlah 37 Orang terdiri 24 Laki-laki dan 13 Perempuan.

Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu raya mendapatkan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Rancangan Kerja Akhir Tahun (RKA) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 10.373.690.301** dengan Realisasi sebesar **Rp. 10.161.621.302** atau sebesar **98%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 7.280.625.630** dengan Realisasi **Rp 7.173.428.490** atau **99%**.

REALISASI ANGGARAN

1.) Belanja Tidak Langsung

Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Persentase %
1. Gaji pokok PNS/Uang Representase	1.555.686.313,00	1.531.755.416,00	98,46%
2. Tunjangan Keluarga	179.009.875,00	176.270.356,00	98,47%
3. Tunjangan Jabatan	198.445.120,00	195.320.000,00	98,43%
4. Tunjangan Fungsional umum	26.842.720,00	26.420.000,00	98,43%
	87.779.413,00	86.397.060,00	98,43%

5. Tunjangan Beras	807.558,00	794.841,00	98,43%
6. Tunjangan PPH/Khusus	24.672,00	24,237,00	98,24%
7. Pembulatan gaji	80.041.000,00	32.991.480,00	41,22%
8. Iuran BPJS	42.860.000,00	16.660.021,00	38,87%
9. IuaranJKK/JKM	921.568.000,00	921.559.401,00	100%
10.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja			
Jumlah	3.093.064.671,00	2.988.192.812,00	96,61%

2.) Belanja Langsung

Rincian Belanja Langsung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	
1	2	3	4	1
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	153.591.030 9.140.000 165.300.000 31.199.500 9.763.000 6.950.000 0	150.501.120 2.341.300 165.300.000 31.199.500 9.763.000 5.238.000 0	98% 26% 100 % 100 % 100 % 75% 0

	Bangunan Kantor			
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3.740.000	3.510.000	94%
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	24.700.000	24.700.000	100 %
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	7.224.431	7.224.431	100 %
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	64.892.239	64.600.000	99,5 4%
	12. Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan Informatika	7.000.000	6.850.000	98%
2 .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	89.458.680	73.689.000	82%
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	284.697.900	282.873.000	99%
	3. Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer	15.000.000	15.000.000	100 %
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	33.890.000	33.768.800	100 %
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.070.000	30.440.000	95%
3 .	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			
	1. Fasilitasi dan	24.134.900	18.934.900	78%

	Koordinasi Pengamanan Informasi 2. Literasi Keamanan Informasi 3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	22.878.950 9.602.300	22.878.950 2.102.300	100 % 22%
4 .	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Penerapan Sertifikat dan Tanda Tangan Digital 2. Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	6.157.100 6.000.000	3.973.100 5.129.800	65% 85%
5 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA 5 Penyusunan LPPD-LKPJ SKPD	10.497.000 2.451.100 13.178.250 17.622.650 9.500.000	8.259.000 2.451.100 11.388.250 16.626.650 7.248.000	79% 100 % 86% 94% 76%
6 .	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : 1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2. Operasional Mobil Pusat Teknologi	0 0	0 0	0 0

	Informasi Komunitas (m-Pustaka)			
	3. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi	880.503.450	873.756.000	99%
	4. Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi,Informasi Wilayah Kabupaten Kubu Raya	527.533.500	523.672.100	99%
	5. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah (MC)	137.885.000	137.105.200	99%
	6. Pengadaan Koneksi Internet Dengan Bandwith	2.903.515.000	2.900.907.500	100%
	7. Monitoring Pengendalian Menara	105.125.500	104.210.500	99%
	8. Pelayanan dan Pengelolaan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Daerah	181.974.000	178.303.000	98%
	9. Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	231.354.500	226.995.850	98%
	10.Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	11..857.050	8.250.000	70%
7.	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government 1. Pengembangan Integrasi Aplikasi e-Monitoring Network Layanan Publik dan Pemerintahan	20.719.800 51.058.200	20.527.800 48.912.900	99% 96%

	2. Monitoring Traffic Bandwith			
	3. Penyelenggaraan Pengembangan SPBE dan Penerapan Smart City	59.256.650	52.633.089	98%
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung TIK Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	950.567.150	934.872.650	98%
	5. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE	67.987.700	67.332.700	99%
8 .	Program Pengembangan Data Informasi Pengumpulan,Pengelolaan dan Analisis Desiminasi Data Sektoral Daerah	70.149.500	69.859.400	100 %
9 .	Program Pembinaan dan Pengembangan,Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	15.297.0000	14.897.000	97%
10 .	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	5.202.600	5.202.600	100 %
	TOTAL	7.280.625.630	7.173.428.490	99%

2. ASSET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG)

NO	URAIAN	TAHUN 2020	KONDISI
1	Antena Rocket Disk	9 Unit	Baik
2	Radio Ubiquity Rocket M5	9 Unit	Baik
3	Acces Point Indoor TP Link	8 Unit	Baik
4	Mikrotik 915 2HND	9 Unit	Baik
5	Power Beam M5-400	2 Unit	Baik
6	Radio Ubiquity Nanostation M5	6 Unit	Baik
7	Unifi Uap AC P	4 Unit	Baik
8	Sectoral AM5G19 120	2 Unit	Baik
9	Radio Ubiquity Bullet 2HP 800 mW	4 Unit	Baik
10	Server (Untuk Database SID)	1 Unit	Baik
11	Note Book / Laptop	1 Unit	Baik

12	Printer Deskjet	2 Unit	Baik
13	Scanner	1 Unit	Baik
14	UPS 1000 VA	1 Unit	Baik
15	Laptop (Egov)	1 Unit	Baik
16	Hardisk Backup	1 Unit	Baik
17	Laptop Sekretariat	2 Unit	Baik
18	Kursi Sekretariat	4 Unit	Baik
19	Printer A3	1 Unit	Baik
20	Sepeda Motor Renja	1 Unit	Baik
21	Kamera	1 Unit	Baik
22	Drone	1 Unit	Baik
23	Go Pro	1 Unit	Baik
24	Tripod Video	1 Unit	Baik
25	Monitor Video	1 Unit	Baik
26	Mic Reporter	1 Unit	Baik
27	Ipad Pro	1 Unit	Baik
28	Hyardisk Server	10 Unit	Baik
29	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Sungai Dungun	1 Unit	Baik
30	Stabilizer Server	1 Unit	Baik
31	UPS Server	1 Unit	Baik
32	Rak Server	2 Unit	Baik
33	Aki	6 Unit	Baik
34	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa	1 Unit	Baik

	Kampung Baru		
35	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Seruat Dua	1 Unit	Baik
36	Pembangunan Tower Triangle Kantor Kecamatan Kubu	1 Unit	Baik
37	Dispenser	3 Unit	Baik
38	AC 2 PK	2 Unit	Baik
39	AC Floor Standing 2 PK	1 Unit	Baik
40	TV	3 Unit	Baik
41	Exhause Fan	1 Unit	Baik
42	Stand Fan	1 Unit	Baik
43	Karpet Permadani	1 Unit	Baik
44	Vacum Cleaner	1 Unit	Baik
45	Laptop	3 Unit	Baik
46	PC (Editing)	1 Unit	Baik
47	Web Cam (HD 1080)	2 Unit	Baik
48	Monitor LED	1 Unit	Baik
49	Stabilized Handheld Camera	1 Unit	Baik
50	Stabilized Handheld Camera	1 Unit	Baik
51	Scanner IKP	1 Unit	Baik
52	Printer Renja Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik

53	Laptop IKP	1 Unit	Baik
54	PC Komputer Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik
55	Kamera IKP	1 Unit	Baik
56	Lensa Canon IKP	1 Unit	Baik
57	Memory Card IKP	1 Unit	Baik
58	Card Reader IKP	1 Unit	Baik
59	Tripod IKP	1 Unit	Baik
60	Sound System IKP	1 Unit	Baik

Tabel II.1 Sarana dan Prasarana Pendukung

2. SARANA INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	MEDIA CENTER	1 LOKASI	Fasilitasi Internet Gratis bagi Masyarakat dan Diseminasi (Penyebarluasan Informasi)
2.	M-PUSTIKA	1 MOBIL	Fasilitasi Alat Penyuluhan Keliling.
3.	WEB MAIL SERVER	1 UNIT	Pengelola Surat Elektronik (e-mail) PNS di lingkungan Pemkab. Kubu Raya
4.	SERVER LPSE	2 Unit	1 Server Induk, 1 Server Back Up (Untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
5.	SERVER SURAT ELEKTRONIK	1 UNIT	Surat Elektronik Untuk Aparatur di Pemkab. Kubu Raya.

6.	WEB SERVER	1 UNIT (Hosting)	Fasilitasi Website : kuburayakab.go.id
----	------------	---------------------	---

Tabel II.1 Sarana dan Prasarana Pendukung

B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kubu raya terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, permasalahan yang mendasar di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar OPD organisasi perangkat daerah atau e-government yang telah terpasang
2. Sistem Komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal
3. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang tidak terjangkau sinyal komunikasi
4. Kurang nya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada
5. Belum optimalnya fungsi (kelompok informasi masyarakat) KIM yang telah terbentuk

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KUBU RAYA TAHUN 2019-2024

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

VISI:

VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5. Program pengembangan data/informasi
- 6. Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah
- 7. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
- 8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 9. Program pengembangan dan implementasi E-Government
- 10. Program pengamanan informasi pemerintah daerah.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai,rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.Maka tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN
--------	---------	---------------------------------

1. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan diwilayah KKR	Persentase konektivitas jaringan IT
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Penetapan kinerja dibuat oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam sebuah format penetapan kinerja dan dilengkapi dengan lampiran penetapan kinerja tahun berikutnya, sebagaimana berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUBU RAYA

N O .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1	(2)	(3)	(4)

)			
1	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan diwilayah KKR	Persentase konektivitas jaringan IT	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 34,05%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	A

Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Keterangan :
1. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 7.578.890.700,-	Rp. 6.185.953.650,-	APBD
2. Program Pengembangan dan Implementasi E-Goverment	Rp. 2.016.021.500,-.	Rp. 1.149.589.500,-	APBD
Total	Rp. 9.594.912.200,-	Rp. 7.335.543.150,-	

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan 2020. akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihanannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kubu Raya tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Output dan Outcome** pada Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya T.A 2020, sebagai berikut :

Sasaran Pertama

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISAS I	%
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan diwilayah KKR	Persentase konektivitas jaringan IT	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 34,05%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 34,05%	100 %

Pada Sasaran Pertama yaitu Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR terdapat 1 indikator kinerja utama yaitu persentase konektifitas jaringan IT dengan target OPD 100%, Kecamatan 100%, Desa 34,05%. Pencapaian yang didapat pada tahun 2020 untuk sasaran strategis Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR dengan indikator kinerja utama persentase konektifitas jaringan IT capaian realisasinya OPD 100%, Kecamatan 100%, Desa 34,05%. Yaitu 16 OPD, 9 Kecamatan dan 39 Desa.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan di wilayah KKR	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.979.748.000,-	4.953.200.150,-	99,46	100%	0,54%

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya dengan Sasaran Strategis Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR pada program :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa tingkat efisiensi sebesar 0,54% diperoleh dari capaian kinerja sebesar 100% di kurang dengan realisasi anggaran sebesar 99,46%. Dengan tingkat efisiensi cukup tinggi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu dengan kegiatan :

1. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi Jumlah Anggaran Rp. 880.503.450,-
2. Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi, Informasi Wilayah Kabupaten Kubu Raya Jumlah Anggaran Rp. 527.533.500,-
3. Pengadaan Koneksi Internet Dengan Bandwith Jumlah Anggaran Rp. 2.903.515.000,-
4. Monitoring Pengendalian Menara Jumlah Anggaran Rp. 105.125.500,-
5. Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi Jumlah Anggaran Rp. 11.857.050,-
6. Pelayanan dan Pengelolaan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Anggaran Rp.181.974.000,-
7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik Jumlah Anggaran Rp.231.354.500,-
8. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah (MC) Jumlah Anggaran Rp.137.885.000,-

Dengan anggaran yang tersedia menunjukkan program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan menunjukkan tingkat keberhasilan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

N O	SASARA N	INDIKA TOR	TARGET KINERJA	REALISASI
--------	-------------	---------------	----------------	-----------

	STRATEGIS	KINERJA UTAMA						
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan di wilayah KKR	Persentase konektivitas jaringan IT	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 16,95%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 16,95%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 34,5%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 16,95%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 16,95%	OPD 100%, Kec. 100%, Desa 34,5%

Berdasarkan tabel diatas, pada sasaran Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR dengan indikator kinerja utama persentase konektifitas jaringan IT presentase realisasi di tahun 2019 sebesar 100 %, realisasi tahun 2019 sebesar 100 % dan realisasi tahun 2020 sebesar 100 %, dari hasil perbandingan tersebut menunjukan hasil konektivitas jaringan IT untuk OPD, Kecamatan, dan Desa capaian realisasi 100% berhasil dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET
			2018	2019	2020	2020

1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan masyarakat perdesaan diwilayah KKR	Persentase konektivitas jaringan IT	100%, Kec. 100%, Desa 16,95 %	100% , Kec. 100% , Desa 16,95 %	100% , Kec. 100% , Desa 34,5 %	100%, Kec. 100%, Desa 34,5%

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan nilai realisasi dari tahun 2019 dan tahun 2020 untuk sasaran Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR dengan indikator kinerja utama persentase konektifitas jaringan IT tidak mengalami penurunan persentase realisasi,untuk target tahun 2020 jumlah target 16 OPD 100%, 9 Kecamatan 100%, 39 Desa 34,5%.

SKPD Yang Terkoneksi Internet Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA SKPD	KETERANGAN
1	SKPD Badan Lingkungan Hidup	Aktif
2	SKPD Badan Pengelolaan Pajak	Aktif
3	SKPD Badan Perencanaan Daerah Kubu Raya	Aktif
4	SKPD Dinas Budparpora Kubu Raya	Aktif
5	SKPD Dinas Catatan Sipil Kubu Raya	Aktif
6	SKPD Dinas Ketahanan Pangan-Kehutanan	Aktif
7	SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	Aktif
8	SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aktif
9	SKPD Dinas Perhubungan Kubu Raya	Aktif
10	SKPD Dinas Pertanian Kubu Raya	Aktif
11	SKPD Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	Aktif
12	SKPD Dinas Sekertariat DPRD Kubu Raya	Aktif
13	SKPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Aktif
14	SKPD Inspektorat Kubu Raya	Aktif
15	SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aktif
16	SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik	Aktif

Kecamatan Yang Terkoneksi Internet Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KANTOR KECAMATAN	KETERANGAN
1	Kantor Kecamatan Sungai Ambawang	Aktif
2	Kantor Kecamatan Kuala Mandor B	Aktif
3	Kantor Kecamatan Rasau Jaya	Aktif
4	Kantor Kecamatan Kakap	Aktif
5	Kantor Kecamatan Kubu	Aktif
6	Kantor Kecamatan Batu Ampar	Aktif
7	Kantor Kecamatan Terentang	Aktif
8	Kantor Kecamatan Teluk Pakedai	Aktif
9	Kantor Kecamatan Sungai Raya	Aktif

Desa Yang Terkoneksi Internet Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Nama Desa	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Desa Penantang Tujuh Kec Rasau Jaya		√	√	√	√
2	Desa Kuala Mandor A Kec Kuala Mandor B		√	√	√	√
3	Desa Sungai Bulan Kec Sungai Raya		√	√	√	√
4	Desa Sungai Asam Kec Sungai Raya		√	√	√	√

5	Desa Sungai Itik Kec Sungai Kakap		√	√	√	√
6	Desa Air Putih Kec Kubu		√	√	√	√
7	Desa Korek Kec Ambawang		√	√	√	√
8	Desa Empening Kec Terentang		√	√	√	√
9	Desa Radak II Kec Terentang		√	√	√	√
10	Desa Muara Baru Kec Sungai Raya	√	√	√	√	√
11	Sungai Kakap Kec Sungai Kakap	√	√	√	√	√
12	Desa Pancaroba Kec Sungai Ambawang	√	✓	√	√	√
13	Desa Kalimas Kec Sungai Kakap	√	✓	√	√	√

14	Desa Jeruju Besar Kec Sungai Kakap	√	✓	√	√	√
15	Desa Lingga Kec Sungai Ambawang	√	✓	√	√	√
16	Desa Rasau Jaya Umum Kec Rasau Jaya	√	✓	√	√	√
17	Desa Kubu Padi Kec Kuala Mandor B	√	✓	√	√	√
18	Desa Terentang Hulu Kec Terentang	√	✓	√	√	√
19	Desa Punggur Besar Kec Sungai Kakap	√	✓	√	√	√
20	Desa Pulau Limbung Kec Sungai Raya	√	✓	√	√	√
21	Desa Sungai Belidak Kec Kakap	√	✓	√	√	√
22	Desa Teluk Pakedai Kec Teluk Pakedai	√	✓	√	√	√

23	Desa Olak- Olak Kubu Kec Kubu	√	✓	√	√	√
24	Desa Tanjung Saleh Kec Sungai Kakap	√	✓	✓	✓	✓
25	Desa Batu Ampar Kec Batu Ampar	√	✓	✓	✓	✓
26	Desa Teluk Bayur Kec Terentang	√	✓	✓	✓	✓
27	Desa Permata Kec Terentang	√	✓	✓	✓	✓
28	Desa Sungai Deras Kec Terentang	√	✓	✓	✓	✓
29	Desa Sungai Nipah Kec Teluk Pakedai	√	✓	✓	✓	✓
30	Desa Sungai Jawi Kec Batu Ampar	√	✓	✓	✓	✓
31	Desa Tanjung Harapan Kec Batu Ampar	√	✓	✓	✓	✓
32	Desa Teluk Kapuas Kec	√	✓	✓	✓	✓

	Sungai Raya					
33	Desa Kuala Dua Kec Sungai Raya	√	✓	✓	✓	✓
34	Desa Kuala Mandor B Kec Kuala Mandor B	√	✓	✓	✓	✓
35	Desa Bintang Mas					✓
36	Desa Teluk Bayur					✓
37	Desa Kampung Baru					✓
38	Desa Kampung Baru					✓
39	Desa Sungai Dungun					✓
Total		26	34	34	34	39

Sasaran Kedua

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan	A	BB	

		Informatika			
--	--	-------------	--	--	--

Pada Sasaran kedua yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD terdapat 1 indikator kinerja utama yaitu Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target kinerja A. Pencapaian yang didapat pada tahun 2020 untuk sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dengan indikator Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian realisasinya dengan predikat nilai BB.

Data Pendukung

- a. Laporan kKinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi setelah Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta Dokumen Terkait Lainnya.
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas nKinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - 1. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kinerja mulai 0 s.d 100 pada Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai nsebesar 74,17 (BB).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2019
1	Perencanaan	30	22,45	24,70
2	Pengukuran Kinerja	25	15,94	16,88
3	Pelaporan Kinerja	15	15,00	15,00
4	Evaluasi Kinerja	10	1,54	3,84
5	Capaian Kinerja	20	13,75	13,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,68	74,17

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJ A UTAMA	TARGET KINERJA			REALISASI		
			20 18	20 19	20 20	20 18	20 19	20 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	B	A	BB	B	BB

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika realisasi tahun 2018 nilai BB, realisasi tahun 2019 nilai B dan realisasi tahun 2020 nilai BB, Dari hasil perbandingan tersebut menunjukkan hasil perbandingan nilai yang berbeda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2020 nilai BB.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI	Target
----	-------------------	-------------------------	-----------	--------

			2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	B	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan nilai realisasi dari tahun 2018 dan tahun 2019 untuk indikator Predikat (Nilai) LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mencapai target yang telah ditentukan,untuk target tahun 2020 jumlah target nilai adalah A.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Faktor Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis Tersedianya jaringan teknologi informasi dan komunikasi bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR:

- 1. Tersedianya Anggaran
- 2. Dukungan dan Sinkronisasi Program-program yang dilaksanakan
- 3. Koordinasi yang baik dengan bidang/seksi yang terkait

B. REALISASI ANGGARAN

No	Program	Realisasi	%
1	Program pengembangan komunikasi,informasi	Rp. 4.953.200.150,-	99,46
2	dan media massa Program Pengembangan dan Implementasi E-	Rp. 1.124.279.139,-	97,80

	Government		
--	------------	--	--

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 disusun mengacu pada Renstra yang memuat visi dan misi sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada Tahun 2019.

Secara umum dikemukakan dalam laporan ini bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dearah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah; untuk saat ini masih relatif baru sehingga belum sepenuhnya difahami.

Mengingat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan evaluasi kinerja yang sangat penting dalam penyusunan program mendatang, oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dalam Instansi Pemerintah pada umumnya, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada khususnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kurang sempurna, oleh karena itu mohon saran dan bimbingan dari pihak-pihak berpengalaman (staceholders) penyusunan LAKIP mencapai kesempurnaan untuk masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya untuk perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Sungai Raya, Januari 2021

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

EDDY MUDIANTO,SH.MH

NIP. 19660823 199503 1 002

PENGUKURAN KINERJA

Lampiran

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB
KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN : 2020

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	Persentas e konektivit as jaringan IT	4.979.748. 000	4.953.200.1 50	99,46 %
2	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government		1.149.589. 500	1.124.279.1 39	97,80 %

Jumlah total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 Rp. 6.129.337.500.,-
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 Rp. 6.077.479.289,-

Sungai Raya, Januari 2021

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

EDDY MUDIANTO, SH.MH
NIP. 19660823 199503 1 002